

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN (SAP) BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
(Studi Empiris pada Instansi Pemerintahan Kabupaten  
Gunung Kidul DIY)**

**Kurnia Rahmah**

*Alumnus Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha  
email: kurniarahmah27@yahoo.com*

**Zulkifli**

*Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
email: zulstieww@gmail.com*

**Abstract**

*This research aims to analyze the effect of application of government accounting standard and the effect of region's financial accounting system on the quality of regency financial statements GunungKidul regency (empirical study at government institutions in GunungKidul regency DIY). There are 36 respondents in this research uses purposive sampling method. SPSS 17.0 is used to analyze hypotheses in this research. Based on the result of this research are application of accrual basis government accounting standard influence positively, but not significant on quality of regency financial statements GunungKidul regency, and region's financial accounting system influence positively, but not significant on quality of regency financial statements Gunung Kidul regency.*

**Keywords:** *Government Accounting Standard, accrual basis, Region's Financial Accounting System, Quality of Region's Financial Report.*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan adanya perubahan masa dari orde baru ke era reformasi sangat memberikan dampak yang positif bagi perubahan paradigma pembangunan nasional. Adapun perubahan paradigma baru ini diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (merupakan revisi dari

UU No.32 Tahun 2004). Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual) yang diberlakukan tahun anggaran 2015. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi

yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa aspek baik dalam bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja yang berbasis akuntabilitas serta transparansi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat (Halim dan Laurensius, 2005).

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 31 disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan, harus sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang-orang yang kompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya bermanfaat baik dalam pengertian, aktivitas yang dapat bermanfaat baik dalam pengambilan sebuah keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna (Huang *et al*, 1999 dalam Xu *et al*, 2003). Agar bermanfaat, informasi akuntansi harus memenuhi beberapa

karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yakni (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah dijelaskan diatas. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat pertanggungjawaban manajemen suatu pemerintah terhadap publik.

Penerapan akuntansi yang baik serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pada sebuah instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberi opini jenis ini, artinya auditor berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah/ dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. <https://id.wikipedia.org/Opini.BPK>.

Standar akuntansi pemerintahan(SAP) merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman intansi pemerintah agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP berbasis akrual, maka akan dapat disusun

keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataan tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Perkembangan opini BPK terhadap hasilaudit laporan keuangan pemerintah daerah sejak 2012 hingga tahun 2015 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Opini BPK atas LKPD Tahun 2012-2015**

No.	Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini LKPD			
		2012	2013	2014	2015
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kabupaten Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kabupaten Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Website BPK RI

laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telahmampumemperbaiki raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki struktur maupun sistem penataan barang milik Negara/Daerah dengan tertib, serta memperbaiki ketentuan ketidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pelatihan terhadap pegawai/ staff yang memiliki kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Semua kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul tersebut dijadikan sebagai sebuah poin penting oleh Pemerintah Daerah yang harus diperbaiki

agar dapat memperoleh dan mempertahankan opini audit WTP dari BPK RI.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan di atas maka, judul penelitian yaitu "*Pengaruh Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) Berbasis Akrua, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*".

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrua berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul? 2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Gunung Kidul?

## **TELAAH LITERATUR**

### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA),

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010 telah membuat perubahan signifikan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP menggunakan basis akrua untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemahaman SAP merupakan suatu pengetahuan yang sangat mendasar dalam menyusun pelaporan keuangan. Dengan adanya pemahaman yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas pelaporan keuangan yang baik pula, serta berpengaruh terhadap kinerja suatu pelaporan keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) adalah:

1. **Relevan**, yaitu informasi yang didalamnya memuat tentang informasi yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna dan dapat membantu mereka dalam menemukan titik keluarnya, baik sebagai alat untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, atau masa kini, dan untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi dimasa depan. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi yang dapat membantu untuk memprediksi masa depan, dengan melihat suatu peristiwa masa lalu dan mempertimbangkannya, serta berdasarkan kejadian masa kini.
  - Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
  - Tepat Waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan.
2. **Andal**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kesalahan material, menyajikan informasi secara benar dan jujur, serta dapat diverifikasi kesalahannya.
3. **Dapat dibandingkan**, yaitu informasi yang dimuat dapat dibandingkan dengan periode yang lalu serta dapat dibandingkan dengan entitas lain yang bergerak dalam bidang yang sama.
4. **Dapat dipahami**, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh semua kalangan ataupun pihak pengguna laporan keuangan. Dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan.

Masyarakat menghendaki agar informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi atau sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

### Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

#### 1. Pengertian SAKD

Menurut Nordiawan (2008), sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### 2. Tujuan SKPD

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu: pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan.

#### 3. Ruang Lingkup SAKD

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.

#### 4. Karakteristik SAKD

SAKD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki karakteristik (Nordiawan, 2008), yaitu basis akuntansi dan sistem pembukuan.

#### 5. Penerapan SAKD

Dalam rangka melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2004), SAKD dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

## **METODA PENELITIAN**

### **Populasi**

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan pada OPD Pemerintahan Daerah kabupaten Gunung Kidul.

### **Sampel**

Menurut Wiyono (2011: 76) sampel merupakan bagian populasi yang terwakili dan akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang terwakili. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Wiyono, 2011: 88). Jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang dari 4 OPD yang tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *pupose sampling*. Kriteria penentuan sampel pada penelitian ini adalah pegawai

yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dan dari 29 SKPD hanya 4 OPD yang dijadikan responden yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus perhitungan Slovin dengan tingkat *error* atau kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%. Sedangkan penentuan jumlah sampel untuk setiap OPD ditentukan secara proporsional. Dimana jumlah pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di satu OPD dibagi dengan total pegawai/staf bagian akuntansi/keuangan di 4 OPD. Kemudian hasilnya dikalikan dengan hasil perhitungan dengan rumus Slovin yang telah dilakukan.

### **Objek Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul. Objek penelitian ini pada OPD di Kabupaten Gunung Kidul yaitu BKAD, BAPPEDA, SATPOL PP dan DPUPRKP.

### **Jenis Data**

Umar (2005), menyatakan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden sesuai objek yang diteliti dan bersifat *up to date*. Adapun kriteria responden pada penelitian ini yaitu pegawai/staf pada bagian akuntansi/keuangan pada instansi pemerintah yang meliputi kepala staf bagian dan para staf subbagian akuntansi/keuangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan

kepada responden atau pengguna laporan keuangan terkait permasalahan yang akan diteliti di instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Adapun hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden terpilih, diolah menggunakan software SPSS. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur yaitu skala *likert* (skala sikap) mempunyai gradasi dari sangat positif ke sangat negatif (Sugiyono, 2013:93). Kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah selesai diisi oleh responden kemudian diukur menggunakan *skala likert* antara 1 sampai dengan 5 yang dipaparkan pada tabel 2 dan tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Skor Skala Likert**  
untuk Kuesioner SAKD dan Kualitas Laporan Keuangan

NO	KETERANGAN	SKOR
1.	Sangat Tidak Setuju	1
2.	Tidak Setuju	2
3.	Netral	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat Setuju	5

**Tabel 3.**  
**Skor Skala Likert**  
untuk Kuesioner Penerapan SAP

NO	KETERANGAN	SKOR
1.	Tidak Menerapkan	1
2.	Hanya Sedikit Menerapkan	2
3.	Sebagian Menerapkan	3
4.	Menerapkan	4
5.	Menerapkan Penuh	5

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional yaitu aspek penelitian yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengukur variabel. Definisi operasional merupakan suatu informasi ilmiah yang sangat penting bagi para peneliti lain dalam rangka membuat suatu penelitian yang sejenis dengan variabel yang sama. Dengan adanya informasi tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana cara melakukan

pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama dan apakah peneliti akan melanjutkan prosedur pengukuran yang sama atau menggunakan prosedur yang baru.

Variabel Penelitian merupakan sesuatu hal yang memang memiliki sifat dan mempunyai variasi tertentu, yang sengaja dibuat untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1994). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel penelitian yaitu, variabel bebas dan variabel terikat.

#### a. Variabel Dependen

Variabel Dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti (Sekaran 2006). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah peneliti ambil sebagai variabel dependen karena kualitas pelaporan keuangan daerah yang disusun oleh instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih relatif rendah dan masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan yang baik yaitu sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Kabupaten Gunung Kidul belum meraih status wajar tanpa pengecualian, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul.

#### b. Variabel Independen

Variabel Independen (Variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif (Sekaran 2006). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah.

1) Standar Akuntansi Pemerintahan  
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah mengatur Penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*General purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  
Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur untuk menyusun laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan.

## 1. Uji Kualitas Data

### a) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid/tidaknya suatu kuesioner dan untuk melakukan pengukuran tingkat keandalan alat ukur yang digunakan. Apabila koefisien korelasinya menunjukkan signifikan 0,361 atau jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilai positif maka pernyataan/ indikator instrument yang digunakan adalah valid (Ghozali, 2009).

### b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas data digunakan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda atau berubah jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Penelitian Sugiyono (2009) menyatakan Instrumen dikatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda, alat ukur dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

## 2. Uji Asumsi klasik

Adapun langkah-langkah yang dilakukan jika menggunakan uji regresi berganda menggunakan beberapa Uji Asumsi Klasik yang harus dipenuhi diantaranya: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedisitas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### a) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Smirnov test* (1-Sampel K-S). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal.

### b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel Independent). Model regresi yang baik yaitu



yang tidak saling berkorelasi antar variabel bebas. Jika diantara variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Ortogonal yaitu variabel independen yang masing-masing variabel memiliki nilai korelasi variabel bebas = 0. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) Nilai Toleransi dan Lawannya, (2) Variance Inflation Faktor (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari Multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan angka *Tolerancenya* mendekati 1. *Tolerance* merupakan variabel-variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan dengan variabel-variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* yang sering digunakan adalah nilai *Tolerance* 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 (Ghozali 2005).

Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika  $VIF < 10$ , dan nilai *Tolerance*  $> 0,1$ . Terdapat multikolinearitas antar variabel independen jika  $VIF > 10$ , dan nilai *Tolerance*  $< 0,1$ .

#### c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi. Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, berarti dapat dikatakan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas (Gozali, 2011). Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan

tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ . Model regresi dapat dikatakan Heteroskedastisitas jika nilai  $\alpha$  lebih besar dari 5%.

### 3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

#### Analisis Regresi Berganda

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis linear berganda adalah analisis regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel-variabel Independen. Menurut Ghozali (2011), untuk memperoleh kebenaran dari prediksi dan pengujian regresi yang dilakukan, maka perlu melakukan berbagai cara untuk mencari nilai Koefisien Determinasi, Uji Simultan dan Uji Parsial.

#### a) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2005). Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Jika  $r = 0$  atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila  $r = +1$ , atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat. Menurut Ghozali (2011), banyak peneliti menyarankan untuk menggunakan adjusted  $R^2$  daripada  $R^2$ . Hal ini disebabkan bahwa jika terdapat penambahan satu variabel Independen maka  $R^2$  akan meningkat. Sedangkan pada Adjusted  $R^2$  akan mengalami kenaikan atau penurunan jika ada penambahan variabel independen dalam bentuk atau model regresi.

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2005). Jika hasil F test diperoleh nilai F hitung lebih besar dari  $df$  dan signifikansi jauh di bawah derajat kepercayaan yang ditentukan maka model regresi dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya: Signifikan bila  $r$  value  $< \alpha$  (0,05).

c) Uji Parsial ( Uji t Statistik)

Uji t statistik berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji nilai t memiliki tingkat signifikansi 5%. Kriterianya yaitu ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yaitu diterima jika nilai  $sig\ t < \alpha$  (0,05).

d) Model Regresi

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

*Keterangan:*

$Y$  : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Slope regresi atau koefisien regresi dari  $X_1$

$\beta_2$  : Slope regresi atau koefisien regresi dari  $X_2$

$X_1$  : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

$X_2$  : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

$e$  : Kesalahan residual (error term)

Persamaan tersebut di atas kemudian dianalisis menggunakan SPSS 17,0 dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Kualitas Instrumen**

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat kevalidan suatu pertanyaan dari penyebaran kuesioner. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $> r$  tabel, maka point pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil uji validitas terhadap data penelitian disajikan pada tabel 4 dibawah ini.

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Validitas Variabel PSAP**

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
PSAP	PSAP 3	0,855	0,361	Valid
	PSAP 5	0,651	0,361	Valid
	PSAP 6	0,372	0,361	Valid
	PSAP 7	0,843	0,361	Valid
	PSAP 8	0,438	0,361	Valid
	PSAP 9	0,857	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki

nilai di bawah 0,361 dan sebagiannya memiliki nilai di atas 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Validitas Variabel SAKD**

Variable	Keterangan	r hitung	rtabel	Keterangan
SAKD	SAKD 1	0,889	0,361	Valid
	SAKD 2	0,852	0,361	Valid
	SAKD 3	0,882	0,361	Valid
	SAKD 4	0,946	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD**

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Keterangan
KLKPD	KLKPD 1	0,915	0,361	Valid
	KLKPD 2	0,793	0,361	Valid
	KLKPD 3	0,898	0,361	Valid
	KLKPD 4	0,931	0,361	Valid
	KLKPD5	0,880	0,361	Valid
	KLKPD 6	0,759	0,361	Valid
	KLKPD7	0,832	0,361	Valid
	KLKPD 8	0,817	0,361	Valid
	KLKPD 9	0,912	0,361	Valid
	KLKPD 10	0,890	0,361	Valid
	KLKPD 11	0,892	0,361	Valid
	KLKPD 12	0,937	0,361	Valid
	KLKPD 13	0,875	0,361	Valid
	KLKPD14	0,885	0,361	Valid
	KLKPD 15	0,907	0,361	Valid
	KLKPD 16	0,937	0,361	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

ada yang tidak valid dan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No 3 (0,855), 5 (0,651), 6 (372), 7 (0,843), 8 (0,438), dan 9 (0,857). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara di bawah 0,361 ada yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,278), 2 (0,309), 4 (0,360). Hasil Uji Validitas Variabel SAKD disajikan pada tabel 5.

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai diatas 0,361 hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 ada 4 yaitu untuk butir pertanyaan No 1 (0,889), 2 (0,852), 3 (0,882) dan 4 (0,946) Hasil Uji Validitas Variabel KLKPD disajikan pada tabel 6.

Secara keseluruhan semua instrument butir-butir pertanyaan terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai diatas 0,361. Hal ini mengindikasikan bahwa semua pertanyaan valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,361 dan 0,900 an ada yaitu untuk butir pertanyaan No 2 (0,793), 3 (0,898), 5 (0,880), 6 (0,759), 7 (0,832), 8 (0,817), 10 (0,890), 11 (0,892),

13 (0,875), 14 (0,885). Adapun butir-butir pertanyaan yang memiliki nilai kisaran antara diatas 0,900 an ada 6 yaitu untuk butir pertanyaan No, 1 (0,915), 4 (0,931), 9 (0,912), 12 (0,937), 15 (0,907), 16 (0,937).

Berdasarkan tabel uji validitas di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi  $r$ -hitung  $>$   $r$  tabel yang diperoleh dibandingkan dengan  $r$ -tabel pada taraf signifikansi 5%. Bila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka alat tersebut dinyatakan valid. Pada penelitian ini nilai  $r$  tabel adalah sebesar 0,361.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel uji validitas menunjukkan bahwa poin-poin pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner mempunyai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,361), hanya item pertanyaan dalam kuesioner penerapan standar akuntansi pemeritahan yang memiliki jawaban tidak valid berjumlah 3 item pertanyaan sedangkan yang valid berjumlah 6 item pertanyaan. Dengan demikian item pertanyaan dalam kuesioner sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan valid.

**b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berubah atau konsisten terhadap instrument penelitian. Jika nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,60 maka instrument penelitian dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas terhadap data penelitian yang disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabilitas	Keterangan
PSAP	0,760	0,60	Reliabel
SAKD	0,912	0,60	Reliabel
KLKPD	0,979	0,60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Tabel 7. menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,760, sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,912, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,979. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Sebelum melakukan analisis jalur, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan *one sample kolmogrov smirnov test*, yang mana jika nilai *asyp.sig (2-tailed)*  $>$  0,05 maka distribusi data dikatakan normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 8. dibawah ini:

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.34822234
Most Extreme Differences	Absolute	.141
	Positive	.101
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.770
Asymp. Sig. (2-tailed)		.594

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil pengujian, maka semua komponen penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdistribusi normal karena nilai *asyp sig (2-tailed)*  $>$  dari 0,05 yaitu sejumlah 0,594.

**b. Uji Multikolinearitas**

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi

yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki nilai *tolerance* yang lebih dari 10% atau 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, untuk melihat hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
PSAP	0,877	1,141	Bebas Multikolinearitas
SAKD	0,877	1,141	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari masing masing variabel independen kurang dari 10.

*factor* (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi ketentuan.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ . Model regresi dapat dikatakan Heteroskedastisitas jika nilai sig lebih besar dari 5%. Hasil Uji Heteroskedastisitas disajikan pada tabel 10.

Dari semua variabel ini tidak terdapat heteroskedastisitas, dimana jumlah sig untuk variabel PSAP sebesar 0,974 dan untuk variabel SAKD nilai sig sejumlah 0,293.

**Tabel 10.**  
Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.401	10.265		-.429	.671
psap	.007	.218	.007	.032	.974
sakd	.598	.558	.215	1.072	.293

a. Dependent Variable: res\_2

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,877 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1,141. Berdasarkan hasil penelitian maka variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan bebas dari multikolinearitas karena sudah memenuhi ketentuan.

Variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,877 dan nilai *variance inflation*

## ANALISIS DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

### a. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi disajikan pada tabel 11.

Tabel 11.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.464 <sup>a</sup>	.216	.158	8.65189

a. Predictors: (Constant), SKAD PSAP

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 11 diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,158 hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan model variasi variabel terikat sebesar 15,8%. Sedangkan 84,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.

#### b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dengan tingkat signifikan dibawah 0,05. Hasil Uji Simultan ANOVA disajikan pada tabel 12.

Tabel 12.  
Hasil Uji Simultan ANOVA<sup>b</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	555.875	2	277.937	3.713	.038 <sup>a</sup>
Residual	2021.092	27	74.855		
Total	2576.967	29			

a. Predictors: (Constant), sakd, psap

b. Dependnt Variable: klkpd

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 12. diketahui nilai sigifikan sebesar 0,038. Karena nilai sigifikan < 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul.

#### c. Uji Parsial (Uji t Statistik)

Statistik t berfungsi untuk menerangkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial diterima jika nilai sig t < (0,05). Hasil Uji Parsial disajikan pada tabel 13.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 13. variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai sig sebesar 0,283, dan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,061.

Kesimpulannya bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig 0,283 > 0,05, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak memenuhi ketentuan karena nilai sig 0,061 > 0,05.

#### Hasil Pengujian Hipotesis dan Analisis Data

##### a. Persamaan Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda disajikan pada tabel 14. Dari tabel 14, dapat disajikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLKPD = 23,317 + 0,378 PSAP + 1,726 SAKD + e$$

**Tabel 13.**  
**Hasil Uji Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.317	16.271		1.433	.163		
psap	.378	.345	.199	1.095	.283	.877	1.141
sakd	1.726	.884	.355	1.952	.061	.877	1.141

a. Dependent Variable:  
klkpd

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2017

**Tabel 14.**  
**Hasil Analisis Regresi**

Variabel	Koef. B	T	Sig	Keterangan
Konstanta	23,317	1,433	0,163	
PSAP	0,378	1,095	0,283	Ditolak
SAKD	1,726	1,952	0,061	Ditolak
Adj. R Square	0,158			
F statistic	3,713			
Sig F	0,038			

Dependen variabel : KLKPD

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017

Hasil analisis persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta KLKPD (Y) sebesar 23,317. Koefisien regresi variabel PSAP ( $X_1$ ) 0,378, dan koefisien variabel SAKD ( $X_2$ ) sebesar 1,726.

#### b. Hasil Pengujian $H_1$

Hasil pengujian  $H_1$  pada tabel 14. menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,378, nilai t hitung sebesar 1,095 dengan nilai sig 0,283 >  $\alpha$  (0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya  $H_1$  ditolak

#### c. Hasil Pengujian $H_2$

Hasil pengujian  $H_2$  pada tabel 14. menunjukkan bahwa koefisien regresi

bernilai positif 1,726, nilai t hitung sebesar 1,952 dengan nilai sig 0,061 >  $\alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang artinya  $H_2$  ditolak.

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Gunung

Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan PSAP secara keseluruhan, pemahaman terhadap PSAP hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan perolehan dana, pengelolaan dana, serta pengeluaran dana saja. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Janaini (2012) dan Kusumah (2012) mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitiannya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Adapun penelitian yang dilakukan pada OPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya hipotesis ini ditolak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, individu penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul memiliki penerapan yang kurang terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini

dapat terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengenalan SAKD secara keseluruhan, pemahaman terhadap SAKD hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Sihombing (2011) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tidak signifikan. Hal-hal yang dapat mendukung perolehan opini WTP Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 yaitu diantaranya memperhatikan penyajian dan pengelolaan aset tetap, melakukan perbaikan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), serta memperbaiki pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar semakin baik kedepannya.

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hasil uji t diperoleh bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.



2. Hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

### Saran

Hasil koefisien determinasi sebesar 0,158 menunjukkan kemampuan variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya hanya 15,8%. Jadi pengaruh kedua variabel masih sangat kecil, oleh karena itu bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambah variabel bebas, agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis.

### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dipaparkan untuk lebih meningkatkan hasil penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Populasi pada penelitian ini hanya mencakup 4 OPD yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Waktu penelitian relatif singkat, sehingga jumlah sampel yang diterima masih jauh dari yang diharapkan.
3. Penelitian ini hanya menguji tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwis, Usman Abu Bakar (2012), *pengaruh penerapan GOOD GOVERNANCE dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh*.
- Donaldson, L., Davis, J, H (1991), Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, *Australian Journal Of Management*, 16, PP 49-46.
- Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haliah (2012), "*Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*", Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Opini.BPK>.
- <https://www.bpk.go.id/diy/konten/1857/Mitra-Kerja>.
- Indriantoro Nur, Supomo Bambang (1999), *Metode Penelitian Bisnis, yogyakarta, BPFE-Yogyakarta*.
- Jannaini, Yuli (2012), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kusumah, Arif Ardi (2012), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No 1.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik* Yogyakarta: Andi
- Nurhayati, Riani, (2013), "pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah", *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.

- Prasetya, Gede Edy (2005), *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerinta Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Rasul, Syahrudin, (2003), *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riana, Susilawati (2014), "Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *ISSN: 1693-4482*
- Ropiyantie, Devi, (2013), "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penerepan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Economic Accounting*, Vol 1, No. 1. *Universitas Siliwangi Tasikmalaya*
- Sekaran Uma, (2006), *Research Methods For Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, Binsar (2011), *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiyono (2010), *Metode Penelitian Bisnis*: Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein (2005), *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Xu, Hongjiang., Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin (2003), "Key issue of accounting information quality management: Australian case studies". *Industrial Management & Data System* 103/ 7, 461- 470.